RENJA 2026

DINAS PERHUBUNGAN
KAB. NUNUKAN



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dapat tersusun.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Sejalan dengan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, maka untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang selaras dengan karakteristik Kabupaten Nunukan guna Meningkatkan pembangunan serta pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur, tentunya bukan hanya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan melainkan perlunya motivasi dan dukungan dari lapisan masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut.

Tanpa mengurangi makna yang tersaji, maka kami berupaya menampilkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang menggambarkan tentang gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Program / Kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan pada Tahun 2026.

Semoga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2026, dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Nunukan, 9 Juli 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nunukan,

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PERHUBUNGAN

H. MUHAMMAD AMIN, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19721214 200112 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 2021-2026 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 52

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 102

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 102
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan 103
3.3. Program dan Kegiatan 103

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 114

BAB V PENUTUP 115

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerh (PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;

4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 17);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2);

37. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Dishub Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dishub Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V. PENUTUP, Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2026.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
	Perhubungan									
02.15.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100**	**90,01**	**100**	**101,85**	**101,85%**	**100**	**97,29**	**97,29%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00**	**100%**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	4	2	2	100,00%	2	8	80%
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	6	3	3	100,00%	3	12	80%
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	8	4	4	100,00%	4	16	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00**	**100%**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	55	54	54	100,00%	55	55	100%
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**91,56**	**100**	**111,11**	**111,11%**	**100**	**100,89**	**101%**
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	520	201	0	0	0,00%	80	281	54%
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200	5	9	10	111,11%	44	59	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**99,5**	**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**99,83**	**100%**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33	12	7	7	100,00%	7	26	79%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52	22	10	10	100,00%	10	42	81%
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	132	41	30	30	100,00%	30	101	77%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	50	20	20	100,00%	20	90	82%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00**	**100%**
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100,00%	12	48	80%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100,00%	12	48	80%
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00**	**100%**
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29	11	6	6	100,00%	6	23	79%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	9	5	5	100,00%	5	19	79%
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1	1	1	100,00%	1	3	75%
02.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan**	**24**	**22,29**	**23,14**	**23,14**	**100,00%**	**24,00**	**24,00**	**100,00%**
		Rasio ijin trayek angkutan darat	**0,000743**	**0,000075**	**0,000330**	**0,000074**	**22,42%**	**0,000516**	**0,000222**	**29,83%**
		Persentase layanan angkutan Darat	**2,45**	**1,58**	**2,96**	**0,62**	**481,22%**	**2,69**	**1,63**	**150,46%**
		Persentase kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	**89,29**	**69,76**	**82,42**	**80,51**	**97,68%**	**85,85**	**78,71**	**88,15%**
		Persentase pemanfaatan terminal	**100**	**100**	**100**	**50**	**100,00%**	**100**	**50**	**50,00%**
		Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	**100**	**62,50**	**75,00**	**75,00**	**100,00%**	**87,50**	**87,50**	**87,50%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0%**
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	0	1	0	0,00%	0	0	0%
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00%	0	0	0%
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3	0	0	0	0,00%	0	0	0%
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemasangan perlengkapan jalan**	**8**	**5**	**6**	**6**	**100,00%**	**7**	**7**	**88%**
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5	2	1	1	100,00%	1	4	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	4	2	1	100,00%	2	7	70%
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6	3	1	1	100,00%	1	5	83%
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	900	300	200	200	100,00%	200	700	78%
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah terminal yang aktif**	**2**	**1**	**2**	**1**	**100,00%**	**2**	**1**	**50%**
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	1	0	0	0,00%	0	1	100%
2.15.02.2.03.09	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	0	1	1	100,00%	0	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1	1	0	0	0,00%	0	1	100%
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	8	1	1	1	100,00%	2	4	50%
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah kendaraan yg diuji KIR**	**664**	**519**	**613**	**599**	**0,00%**	**639**	**599**	**90%**
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	2	1	1	100,00%	1	4	80%
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2750	1074	550	599	108,91%	550	2223	81%
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2750	0	550	0	0,00%	550	550	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	1	1	1	0,00%	1	3	60%
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5	1	1	1	0,00%	1	3	60%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	29	2	7	7	14,29%	7	16	55%
2.15.02.2.05.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10	4	2	2	100,00%	2	8	80%
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	1	1	0	0,00%	1	2	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	1	1	1	0,00%	1	3	60%
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100**	**100%**
2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10	**4**	**2**	2	100,00%	**2**	8	80%
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	6	3	3	100,00%	3	12	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penumpang Angkutan Darat**	**16910**	**66076**	**13976**	**67306**	**169,43%**	**15373**	**148755**	**880%**
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15	6	3	3	100,00%	3	12	80%
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	25	12	5	7	140,00%	5	24	96%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ijin Trayek Angkutan Darat yang dikeluarkan**	**157**	**15**	**37**	**0**	**40,54%**	**67**	**67**	**43%**
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	15	6	3	3	100,00%	3	12	80%
02.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan**	**35**	**31,25**	**32,50**	**32,50**	**100,00%**	**33,75**	**33,75**	**100%**
		Rasio ijin trayek angkutan perairan	**0,001183**	**0,000316**	**0,001016**	**0,000315**	**33,57%**	**0,001096**	**0,000576**	**48,66%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Persentase layanan angkutan perairan	0,1	0,04	0,13	0,04	378,02%	0,11	0,06	157,89%
		Persentase prasarana perhubungan perairan yang dibangun	100	100	96,5	100	103,63%	96,5	100	100%
		Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/ diperlihara	32,14	24,29	25,00	32,14	128,56%	28,57	28,33	88,16%
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan	348076	1884839	287666	771749	268,28%	316433	2973021	854%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.03.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10	4	2	2	100,00%	2	8	80%
2.15.03.2.07	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan**	**250**	**63**	**206**	**64**	**33,51%**	**227**	**227**	**91%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15	**6**	3	3	100,00%	3	12	80%
2.15.03.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan yang dibangun**	**29**	**29**	**29**	**29**	**100,00%**	**29**	**29**	**100%**
		Jumlah Kebutuhan Prasarana Perhubungan Perairan yang direhab atau dipelihara	**100**	**108**	**100**	**150**	**150,00%**	**100**	**119,33**	**119%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	6	1	1	1	100,00%	1	3	50%
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1	1	0	0	0,00%	0	1	100%
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	31	10	6	9	150,00%	7	23	74%
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pelabuhan Sungai yang diawasi	4	1	1	1	100,00%	1	3	75%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Sesuai Tujuan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. II.2

Rencana STRATEGIS Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Meningkatnya infrrastruktur transportasi di wilayah Perbatasan			1	Rasio konektivitas kabupaten	51,43	53,54	55,64	57,75	59,00
		1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana transportasi di wilayah Perbatasan	1	Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan (IK1)	21,43	22,29	23,14	24,00	24,00
				2	Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan (IK2)	30,00	31,25	32,50	33,75	35,00

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan sesuai dengan RENSTRA Dinas Perhubungan tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Nunukan

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*	*-15*	*-16*
1	Rasio konektivitas kabupaten	-	-	51,43	53,54	55,64	57,75	59	51,43	53,54	55,64	57,75	59	-
2	Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan (IK1)	-	-	21,43	22,29	23,14	24	24	21,43	22,29	23,14	24	24	-
3	Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan (IK2)	-	-	30	31,25	32,5	33,75	35	30	31,25	32,5	33,75	35	-
4	Rasio ijin trayek angkutan darat	-	-	0,000087	0,000186	0,000330	0,000516	0,000743	0,000041	0,000035	0,000074	0,000516	0,000743	-
5	Persentase layanan angkutan Darat	-	-	3,58	3,26	2,96	2,69	2,45	8,76	1,92	0,6151	2,69	2,45	-
6	Persentase kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	-	-	75,55	78,99	82,42	85,85	89,29	68,68	0	80,51	85,85	89,29	-

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*	*-15*	*-16*
7	Persentase pemanfaatan terminal	-	-	50	100	100	100	100	50	100	50	100	100	-
8	Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten			50	62,5	75	87,5	100	50	62,5	75	87,5	100	-
9	Rasio ijin trayek angkutan perairan			0,000874	0,000942	0,001016	0,001096	0,001183	0,000149	0,000316	0,000315	0,001096	0,001183	-
10	Persentase layanan angkutan perairan			0,15	0,14	0,13	0,11	0,1	0,04	0,037	0,0466	0,11	0,1	-
11	Persentase prasarana perhubungan perairan yang dibangun			96,5	96,5	96,5	96,5	100	100	100	100	96,5	100	-
12	Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/ diperlihara			17,86	21,43	25	28,57	32,14	14,29	21,43	32,14	28,57	32,14	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN.

2.3.1 Tingkat Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lints dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Dearah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
d. Pelaksaaan administrasi Dinas.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

Kemudian pada RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 ditetapkan 1 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 2 indikator utama yaitu :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana transportasi di wilayah Perbatasan;
   a) Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan;
   b) Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Permasalahan sektor perhubungan di Kabupaten Nunukan ditimbulkan oleh berbagai faktor ataupun beberapa faktor yang saling berkaitan. Sebagian besar terkait rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Nunukan.

Adapun pokok-pokok permasalahan disektor perhubungan yang berhasil teridentifikasi adalah:

1) Terbatasnya prasarana transportasi, permasalahan ini dipengaruhi oleh :
   a) Luasnya wilayah Kabupaten Nunukan dengan kondisi geografis yang terdiri dari banyak sungai dan dataran tinggi, sehingga sangat mempengaruhi kemampuan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penyediaan prasarana transportasi yang baik;
   b) Biaya penyediaan lahan dan status lahan yang belum jelas.
2) Terbatasnya sarana transportasi, permasalahan ini dipengaruhi oleh :
   a) Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi;
   b) Manajemen pengelola transportasi masih konvensional;
   c) Penyebaran penduduk yang tidak merata.
3) Sistem layanan transportasi yang belum memadai, permasalahan ini dipengaruhi oleh :
   a) Belum adanya kajian rencana induk jaringan transportasi lalu lintas angkutan jalan;
   b) Belum adanya kajian rencana induk fasilitas keselamatan (Faskes);
   c) Belum tersedianya sistem informasi transportasi berbasis aplikasi.
4) SDM Transportasi yang masih kurang, permasalahan ini dipengaruhi oleh :
   a) Minimnya personil yang memiliki sertifikasi;
   b) Penempatan personil yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan latar belakang pendidikan bidang transportasi;
   c) Tidak adanya formasi jabatan bidang transportasi.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 tercantum bahwa **Visi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan** periode 2021-2026 adalah :

"***Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera***"

Dinas Perhubungan dalam hal ini mengemban tugas dan menjalankan fungsi untuk mendukung Visi tersebut diatas melalui ***Misi Kedua*** yaitu :

*"**Meningkatkan infrastrulrtur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi"***

Misi ini dijelaskan sebagai berikut :

Ketersediaan infrastruktur memegang peranan penting dalam pemenuhan kebututran pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai salah satu penggerak roda pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena itu pada periode 2O2l-2O26 pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada dua kerangka utama yaitu infrastrukhrr untuk memenuhi pelayanan dasar dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yalg memadai dan saling terintegrasi satu sama lainnya dalam mendukung pengembangan sektor-sektor yang lainnya serta adanya akselerasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan akan dapat membawa malfaat yang lebih besar pada pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Dinas Perhubungan ikut mendukung **Tujuan Pertama** dari **Misi Kedua** tersebut diatas yaitu ***Meningkatkan infrastrulrtur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi***. *Dengan* ***Sasaran Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah***. Hal ini dilaksanakan dengan ***Strategi Meningkatnya infrrastruktur transportasi di wilayah Perbatasan*** Adapun **Arah Kebijakan** yang diambil adalah melaksanakan Pembangunan dan peningkatan prasarana perhubungan, Rehabilitasi prasarana perhubungan, Peningkatan aksesibilitas layanan angkutan umum di desa yang masih tertinggal dan Penyediaan subsidi ongkos angkut penumpang di desa yang masih tertinggal.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam usaha pencapaiannya Dinas Perhubungan memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut :

Tabel. II.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : **Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera**				
No	**Misi dan Program**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor**	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		**Penghambat**	**Pendorong**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1	Misi 2 : Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Terbatasnya Prasarana Transportasi	Letak Geografis yang bercirikan kepulauan dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia	Adanya kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan transportasi di wilayah perbatasan
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	2. Terbatasnya sarana transportasi	Penyebaran penduduk yang tidak merata dan aksesibilitas jalan yang belum memadai	Kebijakan pemerintah dalam pengembangan jaringan transportasi di wilayah perbatasan
3	Program pengelolaan pelayaran	3. Sistem layanan transportasi	Kualitas pelayanan transportasi masih rendah	Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap layanan publik pada Sektor perhubungan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan
		4. SDM Transportasi	Kurangnya minat penyedia jasa transportasi mengikuti program pendidikan dan pelatihan	Adanya program pemerintah dalam pemberdayaan sumber daya masyarakat penyedia jasa transportasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan PD Dinas Perhubungan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dapat dilihat pada Tabel II.5

Tabel. II.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN NUNUKAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
02.15.01	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA*	Kab. Nunukan	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan layanan penunjang lainnya	100	Persen	13.987.019.661	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA*	Kab. Nunukan	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan layanan penunjang lainnya	100	Persen	13.987.019.661	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100	%	69.577.250	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100	%	69.577.250	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	34.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	34.700.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	21.479.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	21.479.250	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	13.398.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	13.398.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**6.191.680.275**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**6.191.680.275**	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang / bulan	6.191.680.275	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang / bulan	6.191.680.275	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**99.946.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**99.946.000**	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	99.946.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	99.946.000	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**790.738.820**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**790.738.820**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	14.994.380	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	14.994.380	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	325.950.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	325.950.000	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13	Paket	299.998.440	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13	Paket	299.998.440	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	149.796.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	149.796.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**6.343.874.296**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**6.343.874.296**	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.517.860.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.517.860.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.826.014.296	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.826.014.296	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**491.203.020**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**491.203.020**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	239.980.220	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	239.980.220	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	99.869.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	99.869.000	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	151.353.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	151.353.800	
02.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kab. Nunukan**	**Rasio konektivitas transportasi darat**	**21,09**	**Persen**	**1.724.914.760**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kab. Nunukan**	**Rasio konektivitas transportasi darat**	**21,09**	**Persen**	**1.724.914.760**	
			Persentase penyediaan perlengkapan jalan	**100**	**Persen**				**Persentase penyediaan perlengkapan jalan**	**100**	**Persen**		

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
			Persentase penyelenggaraan keselamatan lalu lintas	**60,00**	**Persen**				**Persentase penyelenggaraan keselamatan lalu lintas**	**60,00**	**Persen**		
			Persentase layanan angkutan Darat	**1.045**	**Persen**				**Persentase layanan angkutan Darat**	**1,045**	**Persen**		
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Persentase dokumen rencana induk Jaringan LLAJ yang tersusun dan tersosialisasi**	**100**	**Persen**	-	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Persentase dokumen rencana induk Jaringan LLAJ yang tersusun dan tersosialisasi**	**100**	**Persen**	-	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah pemasangan perlengkapan jalan**	**352**	**Unit**	**1.044.005.000**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah pemasangan perlengkapan jalan**	**352**	**Unit**	**1.044.005.000**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	Unit	149.490.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	Unit	149.490.000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	150	Unit	299.888.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	150	Unit	299.888.000	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	Unit	45.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	Unit	45.000.000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200	Unit	549.627.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200	Unit	549.627.000	
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah terminal tipe C yang dikelola dan beroperasi sesuai standar**	**1**	**Unit**	**120.000**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah terminal yang aktif**	**1**	**Unit**	**120.000**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	Unit	120.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	120.000	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**1**	**Laporan**	**294.062.970**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**1**	**Laporan**	**294.062.970**	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	54.736.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	54.736.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	310	Unit	13.600.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	310	Unit	13.600.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	310	Dokumen	24.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	310	Dokumen	24.000.000	
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	17.322.970	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	17.322.970	
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1	Laporan	-	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1	Laporan	-	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8	Unit	137.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8	Unit	137.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Laporan	47.404.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Laporan	47.404.000	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**68.424.890**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**68.424.890**	
2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	18.657.390	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	18.657.390	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	Laporan	49.767.500	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	Laporan	49.767.500	
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Penumpang Angkutan Darat**	**50250**	**Orang**	**273.068.000**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Penumpang Angkutan Darat**	**50250**	**Orang**	**273.068.000**	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	19.380.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	19.380.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7	Unit	253.688.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7	Unit	253.688.000	
2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Laporan**	**45.233.900**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Laporan**	**45.233.900**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Laporan	45.233.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Laporan	45.233.900	
02.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Kab. Nunukan**	**Rasio konektivitas transportasi laut**	**30,63**	**Persen**	**1.939.170.846**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Kab. Nunukan**	**Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan**	**30,63**	**Persen**	**1.939.170.846**	
			Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/ diperlihara	**6,67**	**Persen**				**Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/ diperlihara**	**6,67**	**Persen**		

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
			Persentase ijin trayek angkutan perairan	0,040	Persen				Persentase ijin trayek angkutan perairan	0,040	Persen		
			Persentase layanan angkutan perairan	0,0658	Persen				Persentase layanan angkutan perairan	0,0658	Persen		
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kab. Nunukan	Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan	790347	Orang	1.078.823.250	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kab. Nunukan	Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan	790347	Orang	1.078.823.250	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.03.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	Dokumen	1.078.823.250	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	Dokumen	1.078.823.250	
2.15.03.2.07	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan**	**92**	**Ijin**	**59.993.560**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan**	**92**	**Ijin**	**59.993.560**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.03.2.07.04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	59.993.560	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	59.993.560	
2.15.03.2.12	**Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan Pelabuhan pengumpan lokal Yang Direhab atau Dipelihara**	**100**	**Persen**	**305.818.786**	**Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan Pelabuhan pengumpan lokal Yang Direhab atau Dipelihara**	**100**	**Persen**	**305.818.786**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	Dokumen	16.240.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	Dokumen	16.240.000	
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Unit	276.668.786	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Unit	276.668.786	
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	Laporan	12.910.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	Laporan	12.910.000	
2.15.03.2.12.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	1	Unit	-	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	0	Unit	-	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
-1		*-3*	*-4*	*-5*		*-7*		*-9*	*-10*	*-11*		*-12*	*-13*
2.15.03.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan Sungai dan Danau Yang Direhab atau Dipelihara**	**100**	**Persen**	**494.535.250**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan Sungai dan Danau Yang Direhab atau Dipelihara**	**100**	**Persen**	**494.535.250**	
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	2	Dokumen	84.161.750	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	2	Dokumen	84.161.750	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Unit	399.336.250	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Unit	399.336.250	
2.15.03.2.13.10	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	Laporan	11.037.250	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	Laporan	11.037.250	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan selaku OPD Teknis dari kelompok Masyarakat melalui Camat masing-masing wilayah. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Terhadap beberapa usulan program kegiatan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan anggaran PD yang masih terbatas, sehingga tidak semua usulan dapat terakomodir namun dipertimbangkan untuk diusulkan melalui dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Tabel. II.6

Daftar Usulan Prioritas Hasil Musrenbang Kewilayahan Tahun 2024

Kabupaten Nunukan (RKPD 2025)

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
1	DARWIS	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kondisi pelabuhan penyebrangan Binalawan-Sei Jepun masih berupa jembatan semi permanen diharapakan kedepannya jadi jembatan permanen sehingga lebih tahan lama. Voleme 200 m	RT.02 Pangkalan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Barat	Binalawan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Disetujui, diteruskan untuk skala Prioritas
2	Rusmini Hakim, S.P	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	BELUM ADA LAMPU JALAN UNTUK MENUNJANG PENERANGAN JALAN DI DESA	DESA SRINANTI, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sei Menggaris	Srinanti	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan dapat diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	-
3	Rusmini Hakim, S.P	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DERMAGA DESA YANG MASIH MINIM FASILITAS SEHINGGA MEMBUTUHKAN PELABUHAN UNTUK MEMPERLANCAR AKTIVITAS DI PELABUHAN	DESA SRINANTI, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sei Menggaris	Srinanti	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan dapat diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
4	PUTRA SINAR JAYA	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	sulit melakukan bongkar muat barang dan penumpang karena blm ada Dermaga yang memadai dan perlu di bangun dermaga baru.	Desa Sekaduyan Taka , Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sei Menggaris	Sekaduyan Taka	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	-
5	PUTRA SINAR JAYA	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kondisi Pelabuhan tidak Layak dan perlu perluasan mengingat pelabuhan sungai ular merupakan pelabuhan Penyebrangan tersibuk di Kecamatan Sei Manggaris yang melayani Bongkar muat barang dan Penumpang menuju ke Kecamatan dan Kabupaten Malinau bahkan sampai ke Ibukota Provinsi	Desa Serkaduyan Taka, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sei Menggaris	Sekaduyan Taka	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-
6	ROSNI	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	rehabilitasi dermaga feri	desa samaenre semaja, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sei Menggaris	Samaenre Semaja	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
7	Rusmini Hakim, S.P	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dermaga desa yang masih minim fasilitas sehingga membutuhkan pelabuhan untuk memperlancar aktivitas dipelabuhan	DESA SRINANTI, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sei Menggaris	Srinanti	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-
8	Nurlangit	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Perlu adanya Bantuan penerangan Lampu Jalan di Tempat Pemakaman	DESA, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik	Sungai Manurung	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan dapat diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung, memudahkan prosesi pemakaman di malam hari dan mencegah kerusakan makam oleh hewan liar
9	Nurlangit	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Perlu adanya Pengadaan Lampu Jalan di Berbagai Titik Rawan yang ada di Desa	DESA, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik	Sungai Manurung	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan dapat diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Meningkatkan keselamatan lalu lintas, meningkatkan keamanan pengguna jalan dan membantu menghindari gigitan binatang berbisa dengan volume 20 titik

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
10	DARWIS	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya penerangan jalan sehingga perlu di adakan lampu jalan 80 Unit se Desa Binalawan	Desa Binalawan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Barat	Binalawan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Disetujui diteruskan pada dinas terkait untuk dibahas pada tahap selanjutnya
11	RAMBLI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	kurangnya penerangan jalan menuju Rumah Ibadah sehingga perlu adanya lampu jalan (Volume 5 Unit)	Jl. Sei Lapio RT. 008, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Barat	Setabu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Disetujui diteruskan pada dinas terkait untuk dibahas pada tahap selanjutnya
12	MANSHUR	Kelurahan / Desa	Pembangunan Fasilitas Parkir	Kurangnya Lahan Parkir Area Jembatan Fery Sehinggah lahan Parkir Tidah Memadahi	Jl.Pelabuhan Fery RT 08, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Barat	Liang Bunyu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan dapat diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Disetujui, diteruskan untuk skala Prioritas
13	Muhammad Rizal	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	lampu jalan masih minim di jalan raya dan jalan lain nya	Masing-masing ,sebanyak 30 Buah, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Utara	Sebera ng	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
14	DARWIS	Kelurahan / Desa	Pembangunan Jembatan	Jembatan yang ada sekarang belum memiliki tangga dan pondok sehingga menyulitkan warga air surut untuk turun keperahu. Volume 1 Paket	RT.01 Muara Sungai, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Barat	Binalawan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujaun diganti, Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Disetujui diteruskan pada dinas terkait untuk dibahas pada tahap selanjutnya
15	SYARIFUDDIN	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	perlu adanya Pemasngan rambu-rambu jalan dan Zebra Cross dijalan Sekolah-sekolah dan Masjid	Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Tengah	Aji Kuning	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Diteruskan ke OPD Teknis dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas
16	SYARIFUDDIN	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	perlu adanya Cermin Cembung di jalan simpang menuju jalan masuk Puskesmas untuk menghindari terjadinya kecelakaan	Jl. Bintang Husada, Rt.04, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Tengah	Aji Kuning	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Diteruskan ke OPD Teknis dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas
17	JOKO	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan tersebut sangat penting untuk keamanan dan ketertiban desa	Desa Sujau, RT.001, RT.002, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebuku	Sujau	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
18	LUKMANSYAH.S.AP	Kelurahan / Desa	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kurangnya lampu penerangan sehingga dapat mengakibatkan tabrakan pengendara mobil/motor	RT.13 Mamolo, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan diganti, Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
19	MALAYANI	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	dibutukan untuk menerangi di persimpangan jalan,rumah umum,masjid,gereja,sekolah,lapangan,BPU, babgunan lainya	RT.01 RT.02, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebuku	Tetaban	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	-
20	H. HAMZAH	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlu adanya Pengadaan Lampu Jalan 1 Paket di RT. 08 Desa Tanjung Harapan, agar masyarakat selalu merasa aman jika keluar dimalam hari.	Jl. Bhayangkara RT. 08 Desa Tanjung Harapan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Timur	Tanjung Harapan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	-
21	Darmono	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	masih kurangnya penerangan jalan di dalam desa kunyit	jl. Pembangunan Desa Kunyit Kec. Sebuku Kab. Nunukan , Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebuku	Kunyit	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
22	Muh. Akbar	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya Penerangan Lampu Jalan Sehingga Di butuh PJU Untuk Di Setiap Persimpangan Desa Harapan	RT 001 s/d RT 013 Desa Harapan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebuku	Harapan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	merekomendasikan kegiatan dimaksud menjadi prioritas dan kewenangan daerah.
23	PERI	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tidak adanya Pelabuhan Sungai/Dermaga di RT I.II.III	RT I.II.III, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Tukulon	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-
24	BUDI	Kelurahan / Desa	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	tidak tersedia angkutan umum transportasi jalur sungai	desa samunti, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Samunti	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
25	SULAIMAN	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	kurangnya penerangan jalan dikawasan rawan kecelakaan volume 35	desa bambangan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Barat	Bambangan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Disetujui, diteruskan untuk skala Prioritas
26	YAHYA PIANTO	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU JALAN	RT 1,2,3,4, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sembakung	Butas Bagu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Direkomendasikan kepada OPD terkait untuk dibahas pada Musrenbang Tingkat Kabupaten sebagai usulan skala prioritas Tahun Anggaran 2026
27	JONI	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kurangnya tempat berlabuh perahu angkutan penyebrangan masyarakat	Jl. Semunad , Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Tulin Onsoi	Semunad	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	merupakan pelabuhan lokal masyarakat dan sebagai pendukung Perekonomian warga

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
28	RAMBLI	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	kurangnya penerangan semua jalan di desa setabu maupun Desa persiapan tembaring sehingga perlu adanya bantuan lampu jalan. (volume 50 Unit)	Desa Setabu dan Desa Persiapan Tembaring, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Barat	Setabu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Disetujui, diteruskan untuk skala Prioritas
29	MULIANA	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Belum Tersedianya Tiang Dan Lampu Penerangan Jalan	Desa Makmur, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Tulin Onsoi	Makmur	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-
30	Abdurrohim	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	belum adanya tiang dan lampu penerangan jalan,	Semua jalan/Gang di Desa Sanur, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Tulin Onsoi	Sanur	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	belum adanya lampu jalan di desa sanur
31	JONI	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya lampu jalan di desa	desa semunad, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Tulin Onsoi	Semunad	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	kuranganya penerangan dalam desa (lampu jalan)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
32	JAMRI	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	masih kurangnya penerangan jalan umum, sehingga perlu ditambah.	Desa Bebanas, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebuku	Bebanas	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-
33	SyamsuRijal	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya penerangan jalan pada saat malam hari	Desa Lapri (Volume 30 Unit), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Utara	Lapri	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-
34	SyamsuRijal	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	masih kurangnya tiang listrik untuk mengakses kilometer di perumahan warga	Desa Lapri (Volume 1 Paket), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Utara	Lapri	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Dikembalikan	wewenang Propinsi	Propinsi	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
35	JULANDI	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Perlu perlu perbaiakan	Desa Lubakan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sembakung	Lubakan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Direkomendasikan kepada OPD terkait untuk dibahas pada Musrenbang Tingkat Kabupaten sebagai usulan skala prioritas Tahun Anggaran 2026
36	TAHIR	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	penerangan lampu jalan, tidak adanya penerangan jalan yang bisa mebahayakan masyarakat di malam hari	Desa Atap, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sembakung	Atap	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Direkomendasikan kepada OPD terkait untuk dibahas pada Musrenbang Tingkat Kabupaten sebagai usulan skala prioritas Tahun Anggaran 2026
37	YUBAT	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Desa Tambalang Hulu tangga betonnya tersapu banjir, maka perlu pembangunan baru 70 m	Lumbis Pansiangan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Tambalang Hulu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
38	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PEMASANGAN LAMPU JALAN 25 UNIT	JL. UJANG DEWA RT. 02, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan disesuaikan. usulan sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Diteruskan
39	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PEMASANGAN LAMPU JALAN PENERANGAN JALAN UMUM (JPU) 20 TIANG	JL. LIMAU RT. 03, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan disesuaikan. sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Diteruskan
40	MOPOR	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.Perlunya Dermaga dengan ukuran 4 X 6 2. Tampatan perahu panjang 100 Meter.	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Duyan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
41	MEMENG	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	tidak adanya pelabuhan atau dermaga untuk angkutan sungai	RT.01 Desa Nansapan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Nansapan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-
42	MOPOR	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Sembako Subsidi, perlunya penyediaan barang bersubsidi karena mudah di jangkau oleh masyarakat, sebanyak 6 Ton. 2. Angkutan subsidi, Diperlukan adanya penyediaan angkutan bersubsidi agar masyarakat mudah melakukan perjalanan turun dan mudik, sebanyak 20 Ret. 3. Subsidi minyak BBM, Diperlukan adanya penyediaan Minyak BBM bersubsidi karena sangat di butuhkan oleh masyarakat, sebanyak 6 Ton.	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Duyan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
43	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU PENERANGAN JALAN, 13 TIANG	JL. POROS MENTE SAMBUNG JALAN GUNUNG ADAM MALIK RT 10, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang perlu dilakukan penyediaan lampu jalanan agar dapat memudahkan aktivitas dan jalannya transportasi warga di Jl. Poros Mente Sambung Jalan Gunung Adam Malik RT. 10 pada malam hari
44	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU PENERANGAN JALAN, 2 TIANG	GG. NUSANTARA RT.10, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang perlu dilakukan penyediaan lampu jalanan agar dapat memudahkan aktivitas dan jalannya transportasi warga di Gang Nusantara RT. 10 pada malam hari

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
45	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU PENERANGAN JALAN, 25 TIANG	JL. TANJUNG RT.12, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang perlu dilakukan penyediaan lampu jalanan agar dapat memudahkan aktivitas dan jalannya transportasi warga di Jl. Tanjung RT. 12 pada malam hari
46	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU PENERANGAN JALAN, 12 UNIT	JL. SEI BILAL RT. 15, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	berdasarkan dengan hasil musrenbang perlu dilakukan pembangunan lampu jalan agar dapat mempermudah akses jalan bagi masyarakat sekitar
47	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU PENERANGAN JALAN, 15 TITIK JALAN	JL. ISKANDAR MUDA RT. 16, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	berdasarkan dengan hasil musrenbang perlu dilakukan pembangunan lampu penerangan jalan agar dapat mempermudah aktivitas transportasi warga

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
48	ANDI ARTISAMAN CORHA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENGADAAN LAMPU SURYA PENERANGAN JALAN	JL. PASAR INDUK RT. 05 (TANJAKAN KAMPUNG BECCE), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Timur	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang,pencahayaan disekitar jalan pasar induk RT.05 tanjakan kampung becce masih kurang,sehingga diperlukan pengadaan lampu jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat minimnya cahaya disekitar kawasan tersebut.
49	ANDI ARTISAMAN CORHA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENGADAAN LAMPU TENAGA SURYA PENERANGAN JALAN	JL. KAMPUNG RAMBUTAN RT. 02 (MENUJU KUBURAN MUSLIM), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Timur	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Berdasarkan hasil Musrenbang, perlu pengadaan lampu tenaga surya penerangan jalan agar meningkatkan keamanan, kenyamanan, efisiensi energi, kelancaran aktivitas, serta mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kejahatan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
50	ANDI ARTISAMAN CORHA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENGADAAN LAMPU TENAGA SURYA PENERANGAN JALAN	JL. IMAM BONJOL RT. 06, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Timur	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang,,pencahayaan disekitar jalan imam bonjol RT.06 masih kurang, sehingga diperlukan pengadaan lampu tenaga surya dijalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat minimnya cahaya dikawasan tersebut
51	ANDI ARTISAMAN CORHA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENGADAAN PLANG NAMA JALAN/GANG	RT. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08,09,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Timur	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Dikembalikan	Dana Desa	Dana Desa / Lurah atau swadaya Masyarakat	-	-
52	LUKMANSYAH.S.AP	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kurangnya lampu penerangan sehingga mengakibatkan kendaraan tabrakan	RT.03 Di gang, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
53	JEPRI	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	untuk Subsidi Barang	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Tuntuli bing	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-
54	BUING	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subsidi Barang	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Kabung olor	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-
55	DANEL	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Subsidi Barang 2. Subsidi Angkot	Desa Mamasin, Kec. Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Mamasin	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-
56	PANUSLANGKAU	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subsidi Barang Subsidi Angkut Manusia	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Tau Lumbis	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
57	SYARIFUDDIN	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jauhnya jarak tempuh sebagian pelajar untuk menuju sekolah menjadi salah satu penghambat, kirany sangat dibutuhkan pengadaan angkutan bagi pelajar	Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Tengah	Aji Kuning	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Salah satu Usulan Prioritas dalam MUSRENBANG Kecamatan
58	BALUKANG	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	perlu pembangunan dermaga beton 40 m lebar 2 meter	Desa Sasibu, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis	Sasibu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-
59	NELSON	Kelurahan / Desa	Penyediaan Alat Bantu	perlu adanya penerangan jalan umum Lampu (LED,atau SODIUM) / PJU sekitar jalan umum di kelaster ba'liku.80 UNIT	Ba'liku, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Krayan Tengah	Ba' Liku	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan dapat diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	-
60	Zulham Effendi Harahap, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu penerangan jalan warga pada gang dan lorong jalan (RT.02 Sei Jepun) Kurangnya Penerangan Warga	Jln. Sei Jepun, RT.02, RW.01, Kelurahan Mansapa, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
61	BUDIMAN	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak adanya Lampu Penerangan Jalan Umum di Setiap Jalan Nasional/Provinsi Maupun Kabupaten	Desa Tanjung Aru, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Timur	Tanjung Aru	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-
62	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PENERANGAN LAMPU JALAN 15 TITIK	RT. 06, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan disesuaikan. Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Diteruskan
63	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PEMASANGAN PITA KEJUT/POLISI TIDUR 4 UNIT	RT. 04, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
64	SASAK	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Dermaga Ukuran 4 Meter dan tambatan Perahu	lumbis pansiangan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Bokok	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-
65	ANIEF ARIFIANTO, S.A.P.,M.I.Kom	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	TIDAK ADANYA PENERANGAN LAMPU JALAN PADA RT 01 KNU	RT 01 KELURAHAN NUNUKAN UTARA, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Utara	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan dapat diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Berdasarkan hasil Musrenbang, diperlukan pemasangan lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, dapat mencegah tindak kriminal, mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan memudahkan aktivitas warga pada malam hari
66	YAMAR	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tidak ada pelabuhan atau tambatan perahu	Desa long bulu RT 2, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Long Bulu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
67	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	LAMPU PENERANGAN 10 UNIT	RT. 07, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan diganti,Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
68	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU PENERANGAN JALAN, 2 TITIK	JL. TANJUNG BATU RT.18 (SAMPAI JL. PANTAI TANJUNG BATU), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Berdasarkan hasil musrenbang diperlukan pengadaan lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan,kesela matan dan kenyamanan masyarakat

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
69	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU PENERANGAN JALAN, 10 UNIT	JL. SEI FATIMAH RT.20 (TEMBUS JL.SMK DAN JL. SEI ANJAT), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Berdasarkan hasil Musrenbang, diperlukan pemasangan lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat. Penerangan yang memadai membantu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan di malam hari.
70	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PEKERJAAN PENERANGAN JALAN (P 700 M)	JL. KAMPUNG DAYAK RT. 08, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan diganti, Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
71	KAHARUDDIN,S.IP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlu adanya penamabahan lampu jalan di jalan utama desa sungai pancang	Jl. Utama Desa sungai pancang (20 Unit), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Utara	Sungai Pancang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	-
72	BUDIMAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlu adanya Pengadaan Penerangan Lampu Jalan Umum	RT 01 - RT 16, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Timur	Tanjung Aru	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-
73	KAHARUDDIN,S.IP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perlu adanya penambahan armada angkutan pelajar untuk anak sekolah di desa sungai pancang	UPTD Sebatik utara, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Utara	Sungai Pancang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-
74	SyamsuRijal	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak tersediannya angkutan pelajar bagi siswa SD, SMP, dan SMA sederajat	Desa Lapri (Volume 1 Unit), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Utara	Lapri	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
75	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENGADAAN ANGKUTAN PELAJAR SISWA-SISWI SD DAN SMP	JL. RAHAYU RT.22 (TERMASUK RT.23), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Berdasarkan hasil musrenbang,perlunya pengadaan angkutan khusus bagi pelajar untuk mempermudah dalam perjalanan kesekolah. langkah ini bertujuan untuk meningkatkan aksesbilitas pendidikan dan memastikan keselamatan siswa selama perjalanan
76	Sanudy	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	KAMI SANGAT MEMBUTUHKAN PENERANGAN JALAN DI SIMPANG-SIMPANG DESA LUBOK BUAT	RT. 01, RT. 03, RT. 02, RT. 04, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sembakung Atulai	Lubok Buat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
77	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU PENERANGAN JALAN, 20 UNIT	JL. TANJUNG RT.24, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Berdasarkan hasil musrenbang perlunya pengadaan lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan,keselamatan dan kenyamanan masyarakat
78	Muhammad Rizal	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	belum ada angkutan pelajar sehingga perlu diadakan	Desa Seberang, satu unit, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Utara	Seberang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-
79	Nur Ainun	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum ada penerangan jalan di Pemukiman	RT. 11 Kelurahan Nunukan Tengah, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan diganti,Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Berdasarkan hasil Musrenbang, diperlukan pemasangan penerangan jalan di pemukiman untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
80	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	CONVEX MIRROR (CERMIN CEMBUNG) Tengah Jalan Simpang 3 Masuk Jalan Limau 2 Buah	RT. 03, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
81	DARWIS	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya Rambu-rambu lalulintas menyebabkan pengguna jalan menggunakan jalan tidak sesuai aturan sehingga perlu pengadaan rambu-rambu lalulintas.	Desa Binalawan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Barat	Binalawan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Disetujui diteruskan pada dinas terkait untuk dibahs padaa tahpa selanjutnya.
82	Nur Ainun	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum adanya penerangan jalan di pemukiman	RT. 04 Kelurahan Nunukan Tengah, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Berdasarkan hasil Musrenbang, diperlukan penerangan jalan di pemukiman untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga, serta mengurangi potensi tindak kriminal pada malam hari

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
83	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU PENERANGAN JALAN, 4 GANG	JL. TRANS SP 5 RT.28, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang pentingnya pengadaan lampu penerangan jalan untuk mencegahnya kriminalitas dan meminalisir terjadinya kecelakaan
84	Zuljiansyah, S.I.P	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	LAMPU PENERANGAN JALAN	JL. BRIGADE RT.29, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang pentingnya pengadaan lampu penerangan jalan untuk mencegahnya kriminalitas dan meminalisir terjadinya kecelakaan
85	Nur Ainun	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum adanya penerangan jalan di tempat hunian di gang-gang jalan Fatahillah	RT. 10 Kelurahan Nunukan Tengah, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan diganti,Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang pentingnya pengadaan lampu penerangan jalan untuk mencegahnya kriminalitas dan meminalisir terjadinya kecelakaan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
86	Nur Ainun	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum adanya penerangan jalan disekitar di pemukiman	RT. 09 Kelurahan Nunukan Tengah, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang pentingnya pengadaan lampu penerangan jalan untuk mencegahnya kriminalitas dan meminalisir terjadinya kecelakaan
87	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lampu Penerangan Jalan	Jl. Patimura RT 04, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
88	Nur Ainun	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	belum semuanya jalan disekitar warga gajah mada adanya Penerangan, maka di perlukan Penerangan Jalan	RT. 08 Kelurahan Nunukan Tengah, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang pentingnya pengadaan lampu penerangan jalan untuk mencegahnya kriminalitas dan meminalisir terjadinya kecelakaan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
89	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lampu penerangan jalan kompleks perumahan	RT 08, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
90	Nur Ainun	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penambahan Tiang Listrik di jalan bukit indah	RT. 20 Kelurahan Nunukan Tengah, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan dapat diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Berdasarkan hasil Musrenbang, diperlukan penambahan tiang listrik di Jalan Bukit Indah untuk meningkatkan penerangan jalan dan mendukung keselamatan masyarakat.
91	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lampu Penerangan Jalang Gang Nadus Bura	RT 10, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan diganti,Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
92	BUKEL	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tidak adanya Pelabuhan Sungai/Dermaga Di Rt 02	Rt.02, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis	Podong	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-
93	BUKEL	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Belum Adanya Pelabuhan Sungai/Dermaga Di Rt 01.02	Rt. 01.02, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis	Podong	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya.	-	-
94	Nur Ainun	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Warga dipersemaian mengharapkan adanya Penerangan jalan di wilayah mereka	RT. 15 Kelurahan Nunukan Tengah, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan dapat diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	berdasarkan hasil musrenbang pentingnya pengadaan lampu penerangan jalan untuk mencegahnya kriminalitas dan meminalisir terjadinya kecelakaan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
95	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pemasangan Lampu Jalan Hikmah	RT 10, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan diganti, Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
96	Nur Ainun	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	masih diperlukannya penerangan di sekitar jalan teuku umar	RT. 13 Kelurahan Nunukan Tengah, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya. OPD tujuan diganti	-	berdasarkan hasil musrenbang pentingnya pengadaan lampu penerangan jalan untuk mencegahnya kriminalitas dan meminalisir terjadinya kecelakaan
97	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lampu Penerang Jalan	RT 13, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya. OPD tujuan diganti	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
98	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lampu Penerangan jalan Gang Lawasa	RT 15, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya. OPD tujuan diganti	-	Diteruskan
99	ZULKIFLI, S.I.KOM	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya untuk meneragi jalan yang gelap gulita	RT.03, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	-
100	MARDIN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlu adanya lampu jalan untuk membantu masyarakat melihat pejalan kaki dan pengguna jalan kaki.	Dusun Limau dan Dusun Berjoko., Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Tengah	Sungai Limau	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya.	-	Diteruskan ke OPD Teknis sbg upaya mendukung program prioritas pemenuhan sapras insfrastruktur dasar
101	MARDIN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	perlu adanya penambahan tenaga listrik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Rt.11 dan Rt.14, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Tengah	Sungai Limau	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya.	-	Diteruskan ke OPD Teknis tk. provinsi sbg upaya mendukung program prioritas pemenuhan insfrastruktur dasar

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
102	Zulham Effendi Harahap, S.STP	Kelurahan / Desa	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	pengadaan rambu lalu lintas Kurangnya Rambu lalulintas dalam menunjang fungsi hunian	Jln. Kristianto, RT.05, RW.02, Kelurahan Mansapa (SMA 2 Nunukan Selatan), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Mansapa	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan diganti,Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
103	CECEP SUPRIADI	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perlu adanya angkutan pelajar untuk siswa SMA yang ada di Desa Bukit Harapan karena tidak semua siswa memiliki kendaraan dan siswa akan kesulitan akses kesekolah, berisiko terlambat atau bahkan putus sekolah terutama di desa bukit harapan jarak ke sekolah SMA agak jauh	Desa Bukit Harapan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Tengah	Bukit Harapan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan sebagai Salah satu Usulan Prioritas dalam MUSRENBANG Kecamatan
104	ABIGURDI	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlunya Pemasangan Lampu Penerangan jalan di daerah tikungan dan jalan masuk pondok pesantren dan perumahan dinas yang rawan	PADAIDI, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik	Padaidi	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Meningkatkan keamanan, efisiensi energi dan perlindungan lingkungan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
105	Zulham Effendi Harahap, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	penambahan lampu jalan depan gapura menuju perumahan warga Masih terdapat jalan yang belum tersentuh lampu penerangan jalan yang mengakibatkan seringnya terjadi gangguan ketentran dan ketertiban	Jln. Perumahan Nelayan, RT.06, RW.02, Kelurahan Mansapa, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
106	Zulham Effendi Harahap, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	penerangan jalan dari rt.06 menuju rt.07 Masih terdapat jalan yang belum tersentuh lampu penerangan jalan yang mengakibatkan seringnya terjadi gangguan ketentran dan ketertiban	Jln. Kristianto, RT.07, RW.02, Kelurahan Mansapa (SMA 2 Nunukan Selatan), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Diteruskan
107	Zulham Effendi Harahap, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	penerangan jalan dari Kantor Koramil meuju Kantor Camat Nunukan Selatan Masih terdapat jalan yang belum tersentuh lampu penerangan jalan yang mengakibatkan seringnya terjadi gangguan ketentran dan ketertiban	Jln. Kristianto, RT.07, RW.02, Kelurahan Mansapa (SMA 2 Nunukan Selatan), Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
108	ZULKIFLI, S.I.KOM	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	lampu penerangan lapangan rt 08, agar memudahkan berkegiatan pada malam hari agar mengurangi rawan kecelakaan maupun hal lainnya	RT 08, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan dapat diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	-
109	Zulham Effendi Harahap, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	penerangan jalan dari rt.06 menuju rt.08 Masih terdapat jalan yang belum tersentuh lampu penerangan jalan yang mengakibatkan seringnya terjadi gangguan ketentran dan ketertiban	Jln. Perumahan Nelayan, RT.08, RW.02, Kelurahan Mansapa, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Diteruskan
110	Zulham Effendi Harahap, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyedian Angkutan Umum Untuk Pelajar Perlunya angkutan umum untuk mobilisasi pelajar di wilayah RT.08 Kelurahan Mansapa	Jln. Perumahan Nelayan, RT.08, RW.02, Kelurahan Mansapa, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
111	Samsu Alam	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pelunya Penambahan Lampu Jalan	Desa Maspul , Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Tengah	Maspul	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Diteruskan ke OPD Teknis sbg upaya mendukung program prioritas pemenuhan sapras jalan
112	Oktavianus	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	belum maksimalnya penerangan jalan umum di Desa Long Bawan (150 titik)	Desa Long Bawan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Krayan	Long Bawan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Disetujui
113	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Zona Selamat Sekolah/Zebra Cross untuk anak Sekolah	Jl. Hasanuddin RT. 09 RW. 03 , Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan Daerah dan diteruskan Ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
114	CECEP SUPRIADI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlu adanya pengadaan rambu-rambu jalan di desa bukit harapan agar mobilitas warga lebih aman dan efisien	Desa Bukit Harapan, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sebatik Tengah	Bukit Harapan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan daerah dan diteruskan untuk tahap selanjutnya	-	Diteruskan ke OPD Teknis sbg upaya mendukung pemenuhan sapras jalan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
115	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pengadaan penerangan jalan R. A Bessing samping bandara	RT 05, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan diganti,Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
116	ERSON	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Diperlukan Subsidi Barang agar dapat meringankan kebutuhan Masyarakat setempat	SIBALU. NUNUKAN, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Sibalu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
117	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan Jalan Hasanuddin	RT 05, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
118	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Peneangan Jalan Wanawisata	RT 15, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
119	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan jalan Mambunut dalam	RT 12, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
120	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan Jalan Patimura	RT 04, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
121	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan Jalan Gang Damai	RT 06, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
122	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Peneragan Jalan	RT 07, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
123	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan Jalan kompleks Perumahan	RT 08, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
124	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan Jalan	RT 10, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/ DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
125	ARIEF RACHMADI,SSTP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan Jalan	RT 13, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
126	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu Jalan 20 Paket	RT. 02, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan Prioritas dan Kewenangan Daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
127	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Lampu Jalan 40 Paket	RT. 04, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritasnya dan kewenangan daerah dan diteruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
128	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Lampu Jalan 15 Paket	RT. 06, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritasnya dan kewenangan Daerah dan di teruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
129	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Lampu Jalan 10 Paket	RT. 07, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritasnya dan kewenangan Daerah dan di teruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
130	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Lampu Jalan 14 Paket	Jl. Kampung Dayak RT. 08, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritasnya dan kewenangan Daerah dan di teruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan
131	Afrendi, S.STP	Kelurahan / Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Lampu Jalan 4 Paket Ke Makam	RT. 09, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan prioritasnya dan kewenangan Daerah dan di teruskan ketahapan selanjutnya	-	Diteruskan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN
132	YAMAR	Kelurahan / Desa	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Belum ada dermaga yang baik dan layak	Desa Long Bulu, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	Long Bulu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritasnya dan kewenangan Daerah dan di teruskan ketahapan selanjutnya	-	-
133	SYAHRIAL, S.Pd	Kelurahan / Desa	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Minimnya Penerangan Jalan,,Pengadaan PJU desa 20 Unit	Desa Pelaju, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Sembakung	Pelaju	Kabupaten / Kota	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OPD tujuan disesuaikan. Usulan Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	Direkomendasikan kepada OPD terkait untuk dibahas pada Musrenbang Tingkat Kabupaten sebagai usulan skala prioritas Tahun Anggaran 2026
134	ELSO L	Kelurahan / Desa	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Belum adanya Pelabuhan Sungai	RT 01 Tanjung Hulu, Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Lumbis	Tanjung Hulu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-

Daftar Usulan Program dan Kegiatan
Berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Ka bupaten Nunukan 2024 (RKPD 2025)

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	STATUS	REKOMENDASI MITRA	VOLUME	SATUAN
1	USTANIA, S.E	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	TIDAK ADANYA PENERANGAN LAMPU JALAN UMUM ARAH TANJAKAN JL. ADAM MALIK RT. 10 KEL. NUNUKAN BARAT MENUJU JALAN PERSEMAIAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN PENGUNA JALAN	JL. ADAM MALIK RT.10 KEL. NUNUKAN BARAT, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	1	paket
2	MARADONA, S.E	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	TIDAK ADANYA LAMPU PENERANGAN JALAN DI DESA SEKIKILAN, MAKA DIPERLUKAN PENERANGAN JALAN UNTUK MASYARAKAT	SEKIKILAN, TULIN ONSOI, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	6	titik

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	STATUS	REKOMENDASI MITRA	VOLUME	SATUAN
3	TRI WAHYUNI, S.M	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	SANGAT DIPERLUAKAN PENGERASAN JALAN DI SP 1 SEBUKU	SP 1 , Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	OPD tujuan disesuaikan, usulan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan berikutnya	1	Paket
4	DONAL, S.Pd	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Desa tembus antar Desa di Lumbis Ogong, dari Desa payang sampai Desa Tumantalas	Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	OPD tujuan disesuaikan, usulan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan berikutnya	1	Paket
5	DONAL, S.Pd	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengaspalan jalan simpang desa tulang sampai Desa Sabuluan	Desa Tulang dan Desa Sabuluan, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya. opd tujuan juga disesuaikan	1	Paket
6	SYAFRUDIN, SH	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	belum adanya semenisasi di Gang Brimo	Gang Brimo Jl. Cut nyak Dien RT. 05 Kel. Nunukan Tengah, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya, kamus usulan dan opd tujuan disesuaikan	1	paket

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	STATUS	REKOMENDASI MITRA	VOLUME	SATUAN
7	SYAFRUDIN, SH	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	perlu adanya semenisasi untuk akses jalan yang lebih baik	RT.07 Gang. Budi. Kel. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya, kamus usulan dan opd tujuan disesuaikan	1	paket
8	HAMSING, S.Pi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jalann dan prasarana ya sudah rusak dan tidak memadai	liang bunyu Sebatik Barat, Kab. Nunukan , Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	terkait prasaran jalan pengapuhnya opd Dishub kalau Jalannya PUPR, antara permasalahan dan kamus usulan perlu disingkronkan	350	meter
9	HAMSING, S.Pi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	memperbaiki jalan yang sudah rusak	sei nyamuk, Kab. Nunukan , Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan berikutnya, Kamus usulan dan opd tujuan disesuaikan	350	meter
10	SAID HASAN	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan lampu komunal desa danLampu Jalan	Desa Tagul, sembakung, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan berikutnya	10	Buah lampu

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	STATUS	REKOMENDASI MITRA	VOLUME	SATUAN
11	SAID HASAN	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan lampu penerangan jalanan	Desa Tepian, Sembakung, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Dibatalkan	-	20	Unit
12	ANDI FAJRUL SYAM, S.H	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlu penambahan tiang listrik dijalan kampung kelapa agar jaringan listrik dapat di maanfaatkan oleh warga sekitar	Jalan Kampung Kelapa Gg. H. Arsad RT.02 Kelurahan Tanjung Harapan, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Dibatalkan	-	20	Tiang
13	SAID HASAN	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Masyarakat di Kecamatan Sembakung butuh subsidi angkutan sungai	Kec. Sembakung, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan berikutnya,	30	Orang

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	STATUS	REKOMENDASI MITRA	VOLUME	SATUAN
14	DONAL, S.Pd	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pembangunan Dermaga Desa Sabuluan	Desa Sabuluan, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan berikutnya,	1	Paket
15	KARUNIA, S.IP	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	pembuatan Plat Deker di KEC. Tulin Onsoi	KEC. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sudah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya, kamus usulan dan opd tujuan disesuaikan	20	Unit

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	STATUS	REKOMENDASI MITRA	VOLUME	SATUAN
16	KARUNIA, S.IP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Belum adanya penerangan lampu jalan (PJU) di Kecamatan Tulin Onsoi	Kecamatan Tulin Onsoi, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sudah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	100	Unit
17	ANDI FAJRUL SYAM, S.H	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Susahnya akses masyarakat keluar ketika kondisi curah hujan tinggi	Jl. Panamas rt 03 kec. Mansapa , Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sudah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya. opd tujuan dan kamus usulan disesuaikan	1000	Meter
18	ANDI FAJRUL SYAM, S.H	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlu penyediaan tiang penerangan jalan untuk menghindari bahaya kecelakaan	sekecamatan Nunukan Selatan, Kab. Nunukan	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	sudah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	200	Unit

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan Nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Pembangunan sektor transportasi dengan skala Nasional terakomodir dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menetapkan prioritas pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas wilayah. Dalam konteks sektor transportasi, arah kebijakan nasional menekankan :

- Peningkatan konektivitas antarwilayah untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional dan regional.
- Pengembangan transportasi multimoda dan integrasi antarmoda. • Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi.
- Pengurangan kesenjangan layanan transportasi di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Perhubungan RI dengan Visinya

“Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

dan Misinya :

a) Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;

b) Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;

c) Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;

d) Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;

e) Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama;

f) Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;

g) Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;

h) Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Hubungan yang selaras antara Renja dan Rentra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 yaitu:

a. Tujuan

Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah.

b. Sasaran

1) Meningkatnya Konektivitas Sarana, Prasaran dan Sistem Transportasi Dalam Wilayah Kabupaten.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2026, Program dan Kegiatan tahun 2026 disusun berdasarkan :

a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nunukan;

b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;

c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan.

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2025-2029 direncanakan berjumlah 3 (Tiga) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub. Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan bersifat operasional dan berkenaan dengan belanja modal untuk kegiatan Fisik dimungkinkan diakomodir pada anggaran APBN dan APBD I, Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan Bantuan Keuangan (Bankeu).

Tabel. III.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
02.15.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan layanan penunjang lainnya**	**Kab. Nunukan**	**100**	**Persen**	**16.930.689.878**			**100**	**17.189.012.993**
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**Kab. Nunukan**	**100**	**%**	**69.577.250**			**100**	**71.977.304**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	Dokumen	34.700.000	APBD II		2	35.333.304
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	Laporan	21.479.250	APBD II		3	21.996.000
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Laporan	13.398.000	APBD II		4	14.648.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**100**	**%**	**8.693.987.065**			**100**	**8.867.829.000**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65	Orang/bulan	8.693.987.065	APBD II		65	8.867.829.000
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**100**	**%**	**100.000.000**			**100**	**120.000.000**
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6	Orang	100.000.000	APBD II		6	120.000.000
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**100**	**%**	**790.947.950**			**100**	**860.107.244**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7	Paket	14.997.950	APBD II		10	16.497.750
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10	Paket	325.950.000	APBD II		10	358.609.494
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		13	Paket	300.000.000	APBD II		13	320.000.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20	Laporan	150.000.000	APBD II		20	165.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nunukan**	**100**	**%**	**6.531.828.393**			**100**	**6.594.593.485**
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	1.705.814.097	APBD II		12	1.748.179.189
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	4.826.014.296	APBD II		12	4.846.414.296
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nunukan**	**100**	**%**	**744.349.220**			**100**	**674.505.960**
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10	Unit	239.980.220	APBD II		10	262.136.960
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20	Unit	199.869.000	APBD II		20	219.869.000
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	304.500.000	APBD II		1	192.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
02.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio konektivitas transportasi darat**	**Kab. Nunukan**	**21,09**	**Persen**	**3.563.309.757**			**21,82**	**2.104.313.697**
		Persentase penyediaan perlengkapan jalan		**100**	**Persen**				**100**	
		Persentase penyelenggaraan keselamatan lalu lintas		**60,00**	**Persen**				**70,00**	
		Persentase layanan angkutan Darat		**1.045**	**Persen**				**1.042**	
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ**	**Kab. Nunukan**	**100**	**Persen**	**1.650.000.000**			**100**	**150.000.000**
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1	Dokumen	1.650.000.000	APBD II			
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			Dokumen		APBD II		1	150.000.000
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemasangan perlengkapan jalan**	**Kab. Nunukan**	**352**	**Unit**	**1.081.192.646**			**352**	**1.081.192.646**
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		1	Unit	149.490.000	APBD II		1	149.490.000
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		150	Unit	337.075.646	APBD II		150	337.075.646

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		1	Unit	45.000.000	APBD II		1	45.000.000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		200	Unit	549.627.000	APBD II		200	549.627.000
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah terminal tipe C yang dikelola dan beroperasi sesuai standar**	**Kab. Nunukan**	**1**	**Unit**	**120.000.000**			**1**	**120.000.000**
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		1	Unit	120.000.000	APBD II		1	120.000.000
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kab. Nunukan**	**1**	**Laporan**	**309.740.000**			**1**	**343.600.000**
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2	Orang	54.736.000	APBD II		2	55.000.000
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		310	Unit	13.600.000	APBD II		310	13.600.000
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		310	Dokumen	24.000.000	APBD II		310	25.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	Laporan	20.000.000	APBD II		1	20.000.000
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			Laporan		APBD II		1	15.000.000
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		8	Unit	150.000.000	APBD II		8	150.000.000
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2	Laporan	47.404.000	APBD II		2	50.000.000
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Laporan		APBD II		1	15.000.000
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**100**	**%**	**81.315.211**			**100**	**81.381.051**
2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1	Dokumen	22.000.000	APBD II		1	22.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		2	Laporan	59.315.211	APBD II		2	59.381.051
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penumpang Angkutan Darat**	**Kab. Nunukan**	**50250**	**Orang**	**275.828.000**			**50401**	**276.140.000**
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1	Laporan	22.140.000	APBD II		1	22.140.000
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		7	Unit	253.688.000	APBD II		8	254.000.000
2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**1**	**Laporan**	**45.233.900**			**1**	**52.000.000**
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		2	Laporan	45.233.900	APBD II		2	52.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
02.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Rasio konektivitas transportasi laut**	**Kab. Nunukan**	**30,63**	**Persen**	**2.444.418.820**	**APBD II**		**31,72**	**2.444.418.820**
		Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/ diperlihara		**6,67**	**Persen**				**10,00**	
		Persentase ijin trayek angkutan perairan		**0,040**	**Persen**				**0,048**	
		Persentase layanan angkutan perairan		**0,0658**	**Persen**				**0,0645**	
2.15.03.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**	**Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan**	**Kab. Nunukan**	**790347**	**Orang**	**744.805.630**			**806154**	**756.145.015**
2.15.03.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		2	Dokumen	744.805.630			2	756.145.015

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
2.15.03.2.07	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan**	**Kab. Nunukan**	**92**	**Ijin**	**59.993.560**			**111**	**59.993.560**
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2	Laporan	59.993.560			2	59.993.560
2.15.03.2.12	**Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan Pelabuhan pengumpan lokal Yang Direhab atau Dipelihara**	**Kab. Nunukan**	**100**	**%**	**203.025.119**			**100**	**206.514.806**
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		1	Dokumen	16.240.000			1	16.240.000
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		1	Unit	173.875.119			1	177.364.806
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		1	Laporan	12.910.000			1	12.910.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
2.15.03.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan Sungai dan Danau Yang Direhab atau Dipelihara**	**Kab. Nunukan**	**100**	**%**	**330.054.692**			**100**	**335.638.555**
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan		2	Dokumen	84.161.750			2	84.161.750
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara		1	Unit	234.855.692			2	240.439.555
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pelabuhan Sungai yang diawasi		1	Laporan	11.037.250			1	11.037.250

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub. kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Dinas Perhubungan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub. kegiatan tahunan.

Program, kegiatan dan sub. kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 yang telah disajikan pada Tabel III.1, penyajian program, kegiatan dan sub. kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi Dinas Perhubungan yang menjadi kewenangan, selain itu disajikan pula usulan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat dengan mengharapkan bantuan alokasi dana dari APBD I dan APBN/DAK 2026.

BAB V

PENUTUP

RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029. RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2026 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Nunukan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2026. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2026 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2026.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Perhubungan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2026, dimana RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, seluruh aparatur Dinas Perhubungan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2026.

4. Tata cara penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.